



EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN; ANALISIS KINERJA EKONOMI MENUJU INDONESIA EMAS

Dian Anggraeny Rahim¹

¹ Universitas Darma Persada, Jakarta

Correspondence author: dian.rahim21@gmail.com

Abstrak

Menjelang 100 tahun pascakemerdekaan, target utama dari visi Indonesia Emas adalah masyarakat yang makmur serta keluar dari jebakan kelas menengah menuju masyarakat berpendapatan tinggi. Evaluasi pencapaian visi tersebut diuji melalui keberhasilan kinerja ekonomi, yaitu tingginya PDB, PDB per capita, serta rendahnya kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sektor keuangan (utang, hibah, dan investasi asing) serta indikator makroekonomi (ekspor neto dan inflasi) di Indonesia selama periode 2000 – 2026. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan yang terdiri dari utang, hibah dan investasi asing memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan PDB dan PDB per capita. Net ekspor dan inflasi sebagai indikator makroekonomi terbukti memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada saat yang sama, peningkatan sektor keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan, sebaliknya, nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor dan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

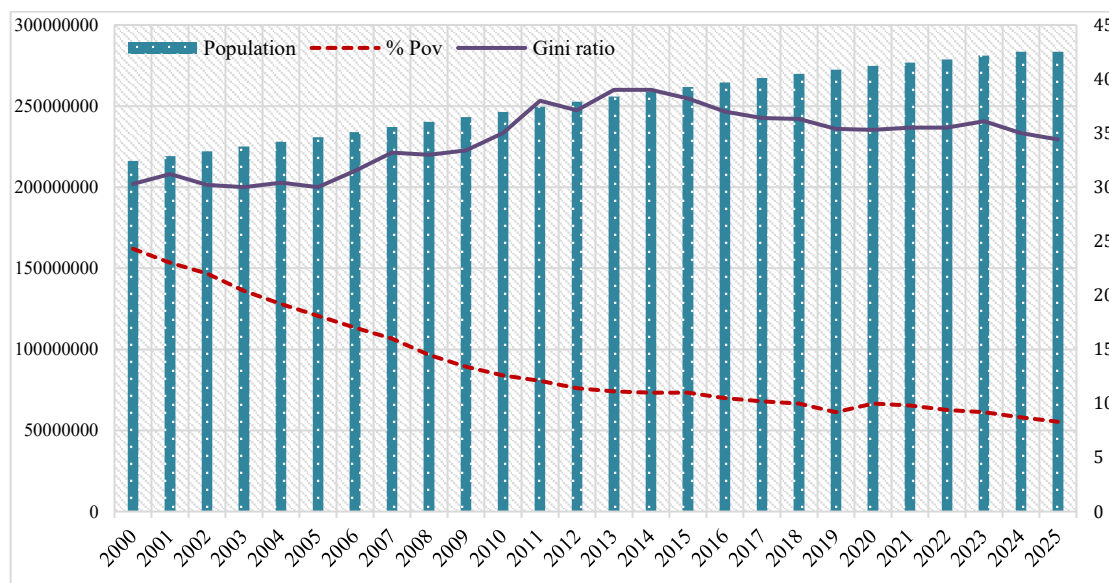
Kata Kunci: kinerja ekonomi, sektor keuangan, indikator makroekonomi, Indonesia Emas

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Fadhilah et al., 2025), (E. (Ned) Hill, 2023). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan terlihat dari empat indikator kinerja ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional (PDB) dan pendapatan per kapita, rendahnya angka kemiskinan, serta ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini (Rahim et al., 2022), (Hulisnaini, 2022). Selanjutnya, kinerja ekonomi pemerintah tersebut dievaluasi dan diperbaiki pada periode berikutnya.

Menjelang 100 tahun pascakemerdekaan, yaitu tahun 2045, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur (Riyanti & Press, 2025), (Sibuea et al., 2025). Target utama dalam visi tersebut adalah Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, menjadi salah satu dari lima negara dengan kekuatan ekonomi di tingkat global, masyarakatnya

memiliki pendapatan per kapita setara dengan negara-negara maju, serta tingkat kemiskinan dan ketimpangan mencapai 0% (Sasrawan, 2025). Sayangnya, harapan untuk mewujudkan visi ini masih harus melalui jalan panjang. Persentase kemiskinan masyarakat Indonesia terhadap jumlah penduduk memang mengalami penurunan tiap tahun (Suyasa et al., 2022). Namun, karena jumlah penduduk semakin besar, secara otomatis jumlah penduduk miskin juga besar (Syahza & Suarman, 2018), (Ningrum et al., 2024). Pada tahun 2000, terdapat 24,3% penduduk miskin dari total jumlah penduduk, dan pada tahun 2025, penduduk miskin Indonesia menjadi sebesar 8,3% dari jumlah penduduk. Sayangnya, dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 1.09%, sehingga jumlah penduduk miskin juga meningkat walaupun secara persentase terjadi penurunan (Gambar 1).



Gambar 1 Jumlah penduduk, persentase penduduk miskin dan Gini index

Sementara harapan Indonesia untuk menurunkan ketimpangan menjadi 0% terlihat semakin berat. Pada tahun 2000–2025, ketimpangan yang ditandai dengan indeks Gini terlihat cukup fluktuatif, namun cenderung meningkat. Kenaikan rata-rata selama rentang tahun tersebut sebesar 0.56%. (Gambar 1). Kondisi ini sekaligus menggambarkan besarnya jurang kesejahteraan antarwilayah di masyarakat.

Pada saat yang sama, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tersebut dibutuhkan sumber daya yang besar, terutama kesiapan ekonomi dan pendanaan yang stabil (Resosudarmo et al., 2026), (Muhyiddin, 2019). Selama ini, keuangan Indonesia ditopang oleh pendapatan dalam negeri, utang, investasi asing, dan hibah (Fernandez et al., 2020), (Lindblad, 2015). Namun, utang Indonesia semakin meningkat, rata-rata 13%, dan terus meningkat tajam. Terkait investasi asing, pada awal-awal tahun 2000 Indonesia mengalami angka negatif, kemudian berangsur naik, namun pada tahun 2016 turun tajam. Hal yang sama juga terjadi pada hibah. Sepanjang tahun 2000–2025, hibah sangat fluktuatif walaupun nilainya meningkat hingga 10%; pada satu masa pernah menjadi negatif. Kondisi fluktuatif ini ditengarai karena iklim ekonomi dan investasi di Indonesia belum maksimal dengan maraknya korupsi, sehingga investor menjadi enggan melakukan kegiatan ekonomi dan

berinvestasi (Anam et al., 2023). Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara .

Kondisi di atas menggambarkan beratnya perjalanan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara empiris sektor keuangan dan indikator makroekonomi terhadap kinerja ekonomi di Indonesia selama tahun 2000 – 2025.

LANDASAN TEORI

1. Pembangunan Indonesia Sepanjang Masa

Pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beberapa kali mengalami perubahan paradigma. Dimulai dari paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, hingga paradigma pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan (Ningrum et al., 2024). Namun, pada intinya, ada tiga paradigma dalam pembangunan, yaitu: pertama, paradigma pertumbuhan yang mengutamakan pembangunan ekonomi semata-mata untuk mewujudkan tujuan yang bersifat materi. Kedua, terdapat pergeseran, yaitu dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan. Paradigma ini menekankan pembangunan yang tidak hanya mementingkan materi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat (Azzahra et al., 2025). Terakhir, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan dengan *community development* sebagai pilar gerakan, menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan keberhasilan, sehingga pembangunan tersebut berkelanjutan (Judijanto et al., 2024).

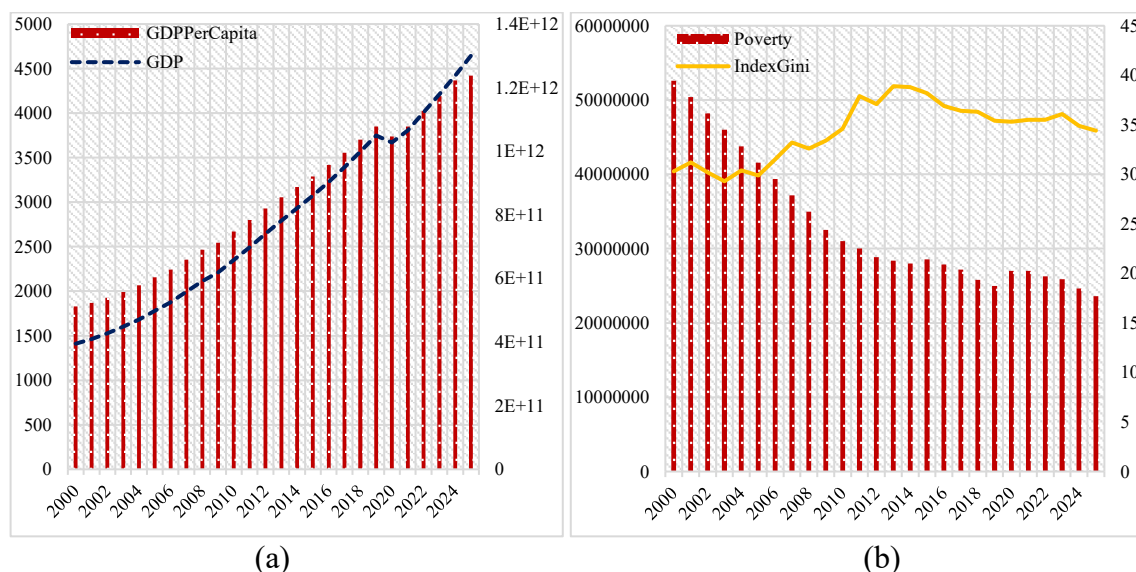
Perencanaan pembangunan Indonesia yang terorganisir sendiri dimulai sejak masa kemerdekaan dan memiliki fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara (Kamaludin, 2023), (H. Hill, 2021). Periodisasi pembangunan ekonomi dimulai pada masa Orde Lama tahun 1945 – 1965, kemudian pada masa Orde Baru tahun 1966 – 1998 dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang stabilitas nasional. Pada tahun 1998 – 2004 dimulai era Reformasi yang membawa perubahan besar pada tata kelola pemerintahan, ditandai dengan lahirnya otonomi daerah. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Indonesia berada pada masa pemerintahan modern yang ditandai dengan percepatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan sumber daya manusia. Untuk sistem perekonomian, Indonesia mengedepankan sentralisasi, pemerataan infrastruktur, serta transformasi menuju visi pembangunan berkelanjutan. Ke depannya, pemerintah Indonesia mencanangkan Visi Indonesia Emas, yaitu suatu konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 (Batsuuri et al., 2026). Visi ini berfokus pada penguasaan teknologi, pembangunan manusia, ekonomi hijau dan ketahanan nasional (Sibuea et al., 2025).

2. Kinerja Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Priambodo & Djirimu, 2024). Perubahan secara berkesinambungan itu diartikan sebagai kinerja ekonomi yang ditandai melalui empat hal, yaitu PDB, PDB per kapita, kemiskinan, dan indeks Gini. Kinerja ekonomi dikatakan berjalan dengan baik jika terdapat peningkatan pada PDB dan PDB per kapita, penurunan pada jumlah kemiskinan, serta rendahnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang ditandai dengan indeks Gini (Rahim et al., 2022). Sebaliknya, kinerja ekonomi dikatakan buruk

jika terjadi penurunan pada PDB dan PDB per kapita, peningkatan pada jumlah kemiskinan, serta tingginya ketimpangan (Sinaga, 2022).

PDB sering diartikan sebagai total barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu, sedangkan PDB per kapita adalah total PDB dibagi dengan jumlah seluruh penduduk negara tersebut (Kurnia et al., 2022), (Coscieme et al., 2020). Angka ini memberikan gambaran kasar mengenai rata-rata tingkat kemakmuran atau pendapatan masyarakat di negara tersebut. Selama 25 tahun, yaitu tahun 2000–2025, PDB dan PDB per capita Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan, yaitu 4.8 % untuk PDB dan 3.6 % untuk PDB per capita, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 2.8 %. Tahun ini merupakan tahun terberat bagi perekonomian Indonesia karena terjadi pandemi Covid-19 (Gambar 2a).



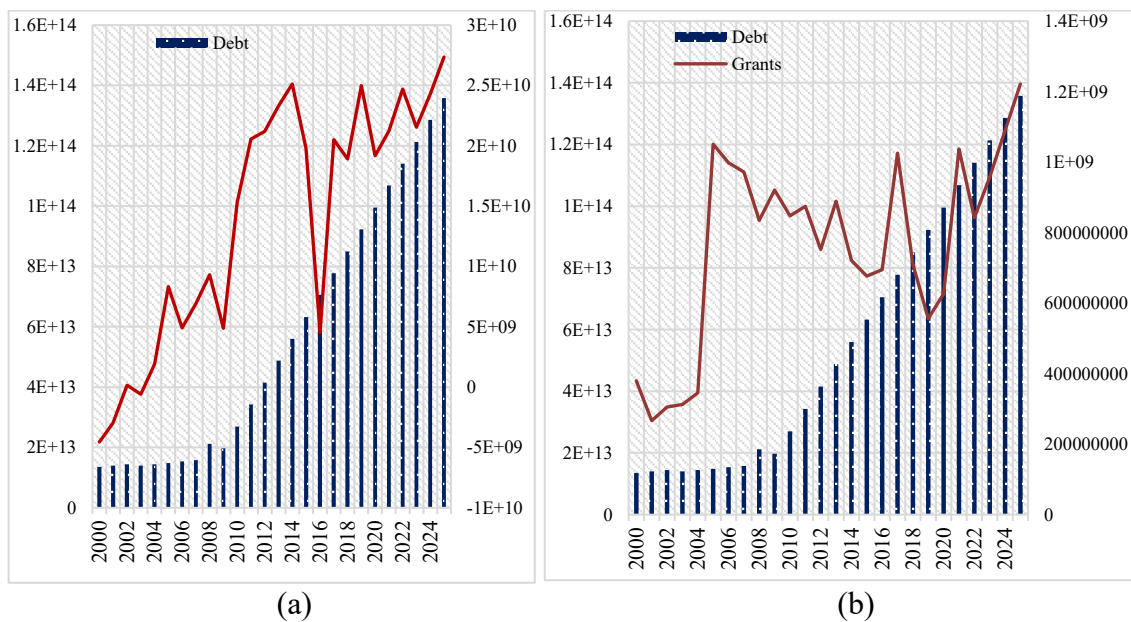
Gambar 2 (a) PDB - PDB per capita Indonesia , (b) kemiskinan – Gini index

Ukuran kinerja ekonomi berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Arham & Payu, 2020), (Suyasa et al., 2022). Kemiskinan di Indonesia cukup fluktuatif, namun terjadi penurunan rata-rata sebesar 3,1%, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan sebesar 1,9% dan pada tahun 2020 sebesar 8% (Gambar 2b). Uniknya, meskipun kemiskinan terus menurun, ketimpangan yang ditandai dengan indeks Gini di Indonesia menunjukkan tren meningkat sebesar 0.5% (Gambar 2b). Indeks Gini sendiri merupakan indikator statistik yang mengukur tingkat ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran di suatu wilayah (Cartone et al., 2022), (Guandalini, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia selama periode 2000–2025 semakin melebar. Artinya, jurang pemisah antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi semakin jauh, atau distribusi pendapatan menjadi tidak merata (Gavilan-Ruiz et al., 2024).

3. Sektor Keuangan: Mengapa Harus Ada Utang, Hibah dan Investasi Asing? Sektor keuangan di Indonesia merupakan bagian dari perekonomian dan sering merujuk pada lembaga yang menyediakan layanan keuangan, seperti perbankan, lembaga pengelola utang, serta lembaga investasi (Rachmawati et al., 2018). Utang, hibah dan investasi merupakan produk dari sektor keuangan (Simanaviciene et al., 2015). Investasi

dibagi menjadi investasi asing dan investasi dalam negeri. Utang diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus dibayarkan Indonesia atas pinjaman yang dilakukan oleh negara lain. Secara umum, Indonesia menggunakan utang untuk menutupi defisit anggaran dalam pembiayaan pembangunan (Adiningsih, 2009). Berbeda dengan utang, hibah adalah aset atau bantuan yang diberikan negara lain kepada Indonesia, tanpa harus dikembalikan (Sofilda et al., 2023). Sementara investasi asing adalah penanaman modal dengan tujuan bisnis yang dilakukan pihak luar di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan bersama (Rahim, 2023).

Sejatinya, Indonesia membutuhkan utang untuk membiayai pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian (Sari, 2022). Mengacu pada data yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2000–2025, terlihat bahwa utang Indonesia dari tahun ke tahun meningkat cukup tajam, terutama sejak 2008 (Gambar 3a – 3b). Kondisi utang yang terus meningkat ini menunjukkan besarnya belanja pemerintah yang melampaui pendapatan negara. Kekurangan dalam menutupi belanja inilah yang sering disebut defisit anggaran. Di sisi lain, Indonesia mengalami permasalahan yang cukup pelik. Untuk utang yang dilakukan dalam mata uang dolar, pembayaran bunga dan cicilannya harus dilakukan menggunakan dolar juga, sedangkan mata uang rupiah terus mengalami degradasi terhadap dolar. Untuk menutupi ini, Indonesia harus berutang kembali, sehingga Indonesia terjatuh dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan (Thawley et al., 2024). Para ahli ekonomi mencatat tingkat ketergantungan Indonesia pada utang sekitar 40.76 % dari total PDB.



Gambar 3 (a) Perbandingan utang - investasi asing, (b) utang – hibah

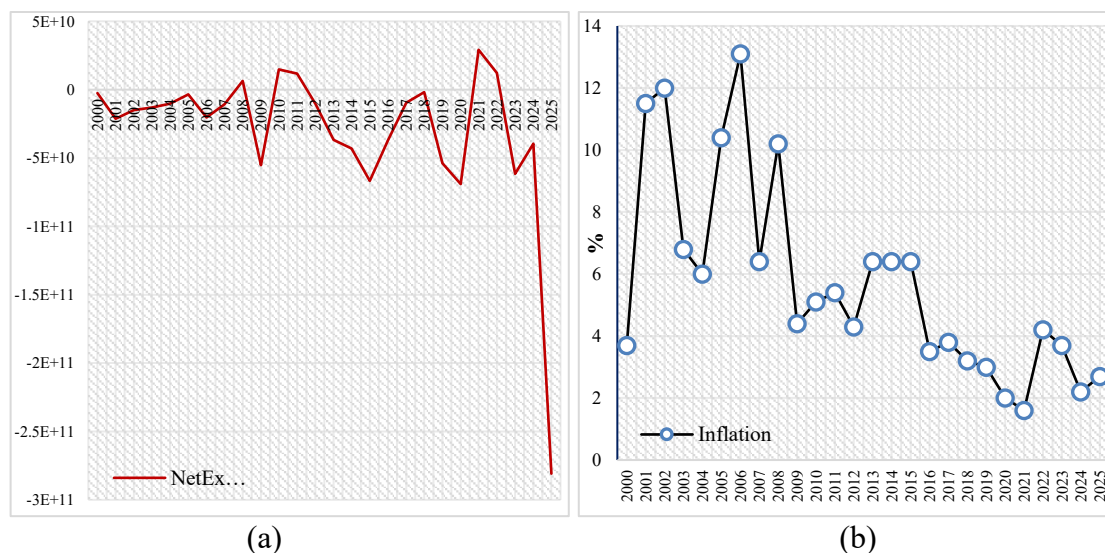
Tidak hanya dari utang, Indonesia juga membutuhkan investasi asing dan hibah agar ekonomi bergerak (Fernandez et al., 2020). Tetapi investasi asing dan hibah selama tahun 2000 – 2025 terlihat tidak stabil. Pada tahun 2018, investasi asing di Indonesia menurun tajam, tetapi kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya sebesar 32 %. Sepanjang 25 tahun, investasi asing tertinggi ada pada tahun 2025, tetapi kenaikannya dari tahun sebelumnya hanya sebesar 12 % (Gambar 3a). Hampir mirip dengan investasi asing, hibah di Indonesia juga mengalami fluktuasi yang cukup ekstrem. Hibah tertinggi terjadi

pada tahun 2005, kemudian cenderung turun. Titik paling rendah terjadi pada tahun 2019, walaupun terdapat kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan persentase yang tidak terlalu besar (Gambar 3b).

4. Indikator Makroekonomi: Net Ekspor dan Inflasi di Indonesia

Net ekspor diartikan sebagai selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika ekspor lebih besar, maka disebut surplus; sebaliknya, jika ekspor lebih kecil daripada impor, maka disebut defisit (Akmalplur & Shamadeen, 2017), (Akbas & Sancar, 2021). Indikator net ekspor penting diketahui karena mencerminkan ukuran daya saing perdagangan internasional, penggerak ekonomi nasional dan penyeimbang neraca pembayaran. Sementara itu, inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus pada suatu waktu (Su & Soon, 2024), (Binetti et al., 2024). Inflasi pada kenyataannya menurunkan nilai riil uang karena semakin tinggi angka inflasi, semakin rendah kemampuan masyarakat berbelanja karena harga barang-barang yang mahal. Dengan kata lain, inflasi menggambarkan kestabilan daya beli masyarakat serta pedoman dalam kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah (Sriyana, 2022). Kedua indikator makroekonomi ini bermuara pada peningkatan atau penurunan PDB dan PDB per capita.

Sepanjang tahun 2000 – 2025, net ekspor Indonesia lebih banyak menunjukkan angka negatif, yaitu ekspor lebih kecil daripada impor. Catatan pemerintah menunjukkan Indonesia mengalami ketergantungan pada impor, terutama bahan baku dan penolong sekitar 70 %, sementara bahan konsumsi sebesar 10 %. Walaupun begitu, pada tahun 2008, 2010-2011, dan 2021-2022 nilai ekspor lebih besar daripada impor (Gambar 4a). Net ekspor yang negatif ini sejatinya merupakan rapor merah bagi pemerintah, karena terbukti menghabiskan devisa negara dan membuat perekonomian menjadi high-cost.



Gambar 4 (a) Tingkat inflasi, (b) Net ekspor Indonesia 2000 – 2025

Sebagaimana yang telah dijelaskan, inflasi yang baik ditandai dengan angka yang rendah atau kecil. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bahwa target inflasi yang ideal harus di bawah dua digit, yaitu di bawah 10 %. Sepanjang tahun 2000 – 2025, inflasi Indonesia cukup fluktuatif, terutama pada awal 10 tahun pertama pada tahun 2000. Pada tahun 2019 dan 2020, inflasi mencapai target pemerintah, yaitu 2 %, tetapi tahun berikutnya

meningkat menjadi 4 % dan turun lagi menjadi 2 % pada tahun 2024 (Gambar 4b). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun fluktuatif, pemerintah berhasil menjaga inflasi sesuai target.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder tahun 2000–2025 dan menggunakan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan bersumber dari World Bank dan Badan Pusat Statistik. Regresi linier berganda merupakan metode statistik untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Kumari & Yadav, 2018). Kelebihan metode statistik ini adalah memiliki kemampuan prediksi yang akurat serta mampu menghitung besarnya efek dan arah hubungan (positif atau negatif) dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan menjaga variabel lainnya tetap konstan (Nabillah & Ranggadara, 2020). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja ekonomi, sementara variabel bebas yang digunakan meliputi sektor keuangan dan indikator makroekonomi (Tabel 1).

Tabel 1 Operasional variabel penelitian

Variable	Indikator	Unit	Keterangan
Variabel Dependent			
Kinerja Ekonomi	PDB (Y ₁)	USD	Total nilai dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara pada 1 tahun
	PDB per capita (Y ₂)	USD	Ukuran pendapatan rata-rata penduduk pada 1 tahun
	Kemiskinan (Y ₃)	Million	Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian
	Index Gini (Y ₄)	Point	Ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu wilayah
Variabel Independen			
Sektor Keuangan	Utang (X ₁)	USD	Pinjaman berupa pemberian sejumlah uang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, dan pemerintah memiliki kewajiban membayar utang tersebut dengan cara dicicil serta memiliki bunga
	Hibah (X ₂)	USD	Pemberian sukarela suatu negara pada Indonesia dan tidak untuk dibayarkan kembali
	Foreign Direct Investment (X ₃)	USD	Investasi atau penanaman modal yang dilakukan pihak asing di Indonesia untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan
Indikator Makroekonomi	Net Export (X ₄)	USD	Selisih antara total barang dan jasa yang dijual ke luar negeri (ekspor) terhadap barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri (impor)

Variable	Indikator	Unit	Keterangan
	Inflation (X ₅)	Point	Kenaikan harga terus-menerus pada suatu waktu
t			Tahun, 2005 - 2025
β			Konstanta

Sementara, persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Pendapatan Negara

$$LnGDP = \beta_0 + \beta_1 LnX_{1t} + \beta_2 LnX_{2t} + \beta_3 LnX_{3t} + \beta_4 LnX_{4t} + \beta_5 LnX_{5t} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

2. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Pendapatan Per Capita

$$LnGDP_{cap} = \beta_0 + \beta_1 LnX_{1t} + \beta_2 LnX_{2t} + \beta_3 LnX_{3t} + \beta_4 LnX_{4t} + \beta_5 LnX_{5t} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

3. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Kemiskinan

$$LnPov = \beta_0 + \beta_1 LnX_{1t} + \beta_2 LnX_{2t} + \beta_3 LnX_{3t} + \beta_4 LnX_{4t} + \beta_5 LnX_{5t} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

4. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Gini Index

$$LnGini = \beta_0 + \beta_1 LnX_{1t} + \beta_2 LnX_{2t} + \beta_3 LnX_{3t} + \beta_4 LnX_{4t} + \beta_5 LnX_{5t} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Pendapatan Negara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang signifikan dan positif yang mampu meningkatkan PDB Indonesia, yaitu utang, hibah dan investasi asing, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 98 % (Tabel 2). Pertama, kenaikan utang 1 % mampu meningkatkan PDB sebesar 69 %. Memang secara empiris terbukti dalam jangka pendek dan menengah utang mampu menaikkan PDB Indonesia, terutama jika utang tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif. Tetapi hal ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah: dalam jangka panjang, utang dan cicilan akan menjadi beban dan mampu menurunkan PDB, terutama jika penggunaan utang tersebut dilakukan tanpa tanggung jawab penuh (Adiningsih, 2009), (Thawley et al., 2024). Hal ini terbukti pada krisis ekonomi tahun 1998, ketika terjadi jatuh tempo dan pembayaran cicilan utang pada saat yang bersamaan (Simangunsong, 2022). Krisis ekonomi ini menjalar menjadi krisis politik dan ditandai dengan jatuhnya rezim pemerintahan. Kedua, 1 % kenaikan pada hibah mampu meningkatkan 8.16 % PDB. Penggunaan hibah dalam biaya pembangunan terlihat lebih menguntungkan bagi pembangunan karena Indonesia tidak memiliki kewajiban mengembalikannya. Hibah yang tepat sasaran juga mampu memberikan dampak multiplier effect bagi masyarakat sekaligus meringankan beban anggaran. Ketiga, setiap kenaikan investasi asing sebesar 1% mampu meningkatkan PDB sebesar 15.7 %. Investasi asing pada kenyataannya terbukti mampu meningkatkan PDB melalui pajak dan membuka lapangan kerja yang luas. Untuk itu, pemerintah Indonesia memberikan banyak stimulus ekonomi bagi investor asing.

Tabel 2 Pengaruh sektor keuangan dan indikator makro terhadap PDB

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
C	0.105703	0.051595	2.048702	0.0538	
DEBT	0.691007	0.04323	15.98449	0**	3.946
GRANTS	0.081675	0.033375	2.447179	0.0238*	1.569
FOREIGNDIRECTINVESTMENT	0.157781	0.041138	3.835425	0.001**	3.072
NETEXPORT	-0.03448	0.046174	-0.74673	0.4639	1.310
INFLASI	-0.0689	0.038198	-1.80377	0.0864	2.033
R-squared					0.988246
Durbin-Watson stat					1.204792
Prob(F-statistic)					0

* : $\alpha=0.05$, ** : $\alpha=0.01$

Untuk indikator makroekonomi, variabel ekspor neto dan inflasi menunjukkan hasil negatif terhadap peningkatan PDB. Setiap kenaikan net ekspor sebesar 1 % menyebabkan penurunan PDB sebesar 3.4 %. Pada kenyataannya, besarnya impor dibandingkan dengan ekspor menjadikan pendapatan negara berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada inflasi, yaitu setiap kenaikan inflasi 1 % menurunkan PDB sebesar 6.89 %.

2. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Pendapatan Per Capita

Penelitian ini menjelaskan bahwa sektor keuangan memberikan pengaruh positif terhadap PDB per capita dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 92 %, tetapi hanya signifikan pada utang dan investasi asing (Tabel 3). Sejauh ini, utang yang dilakukan pemerintah selalu diarahkan pada kegiatan produktif, sehingga memberikan dampak positif pada masyarakat (Smith & Yezer, 2025), (Dasgupta & Mookherjee, 2023). Beberapa penggunaan utang untuk pembiayaan produktif yang memberikan dampak langsung pada masyarakat adalah pembangunan infrastruktur ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, serta kebutuhan pertanian bagi masyarakat. Setiap kenaikan utang sebesar 1 % mampu meningkatkan PDB per capita sebesar 69,4 %. Pada hibah, walaupun tidak signifikan, tetapi bernilai positif, dimana setiap kenaikan hibah 1% mampu meningkatkan 8.0 % PDB per capita. Beberapa alasan tidak signifikan adalah bahwa di Indonesia hibah umumnya diberikan untuk bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta pemberdayaan masyarakat atau bantuan infrastruktur pendidikan untuk wilayah tertentu dan tidak merata di semua wilayah. Berbeda dengan utang yang pemanfaatannya merata di seluruh Indonesia. Kemudian, investasi asing memberikan dampak positif dan signifikan pada PDB per capita (Rahim, 2023), yaitu kenaikan investasi asing sebesar 1 % mampu meningkatkan PDB per capita sebesar 20 %. Hal ini terjadi karena investasi asing mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. Di berbagai daerah, investasi asing juga telah menjadi motor penggerak ekonomi, menutupi kekurangan modal domestik.

Tabel 3 Pengaruh sektor keuangan dan indikator makro terhadap PDB per capita

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
C	0.077668	0.066173	1.17372	0.2543	
DEBT	0.694606	0.055444	12.52808	0**	3.946
GRANTS	0.080566	0.042805	1.882163	0.0744	1.569
FOREIGNDIRECTINVESTMENT	0.200929	0.052761	3.808294	0.001**	3.072

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
NETEXPORT	-0.013361	0.059219	-0.225613	0.823	1.310
INFLASI	-0.082468	0.048991	-1.683337	0.108	2.033
R-squared					0.98216
Durbin-Watson stat					1.12889
Prob(F-statistic)					0

* : $\alpha=0.05$, ** : $\alpha=0.01$

Untuk indikator makroekonomi, keduanya memiliki pengaruh negatif terhadap PDB per capita, tetapi yang signifikan hanya inflasi (Tabel 3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 % pada net export akan menurunkan PDB per capita sebesar 1.3 %. Pada kenyataannya, walaupun tidak secara langsung berpengaruh pada PDB per capita, ekspor netto dapat menurunkan PDB dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sementara inflasi secara jelas mampu menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Setiap kenaikan 1 % pada inflasi mampu menurunkan 8.2 % PDB per capita.

3. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sektor keuangan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan dan pengaruh signifikan terhadap investasi asing (Tabel 4). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 87.5%. Variabel utang terbukti memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, di mana setiap peningkatan 1 % utang mampu menurunkan 8.86 % kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya, variabel ini memiliki prasyarat yang berat untuk mampu menurunkan kemiskinan, yaitu jika digunakan untuk pembiayaan produktif (Adiningsih, 2009). Jika sebaliknya, utang justru akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Dalam hal ini, kelihatannya selama 26 tahun Indonesia berhasil menggunakan utang untuk kepentingan yang on track melalui pembiayaan produktif. Sejalan dengan utang, variabel hibah juga menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, yaitu setiap kenaikan 1 % hibah mampu menurunkan kemiskinan sebesar 20 %. Sebagaimana utang, hibah memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu jika penggunaannya untuk kegiatan produktif, hibah akan mampu menurunkan kemiskinan dan sebaliknya. Pada kenyataannya, investasi asing mampu menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, di mana setiap kenaikan 1 % pada investasi asing mampu menurunkan kemiskinan sebesar 58%. Hasil ini sekaligus menjelaskan pentingnya investasi asing dalam pembangunan Indonesia selama 26 tahun. Terbukti investasi asing mampu merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mengurangi pengangguran. Investasi asing juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan serta memberikan pajak bagi pemerintah.

Tabel 4 Pengaruh sektor keuangan dan indikator makro terhadap kemiskinan

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
C	0.754625	0.164811	4.57872	0.0002	
DEBT	-0.08863	0.13809	-0.64179	0.5283	3.946
GRANTS	-0.20483	0.106611	-1.92131	0.0691	1.569
FOREIGNDIRECTINVESTMENT	-0.58159	0.131407	-4.42583	0.0003**	3.072
NETEXPORT	0.03378	0.147493	0.22901	0.8212	1.310
INFLASI	0.209899	0.122017	1.720249	0.1008	2.033

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
R-squared					0.875079
Durbin-Watson stat					1.299252
Prob(F-statistic)					0

* : $\alpha=0.05$, ** : $\alpha=0.01$

Sebaliknya, sektor keuangan menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan 1% pada net ekspor mampu menaikkan 3.3 % kemiskinan dan 1 % kenaikan pada inflasi akan menaikkan 20.98 % pada kemiskinan. Sejatinya, net ekspor yang bernilai negatif sebagaimana yang terjadi di Indonesia memang mematikan peran UMKM dan perekonomian masyarakat, sedangkan inflasi secara langsung mampu menaikkan jumlah kemiskinan. Kenaikan harga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama jika jumlah pendapatan tetap dan kondisi ekonomi bergantung pada impor atau ekonomi global.

4. Pengaruh Sektor Keuangan dan Indikator Makroekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Gini Index)

Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 68.5% (Tabel 5). Untuk variabel utang, setiap kenaikan 1% mampu menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 26.8%. Setiap kenaikan 1% hibah mampu menurunkan ketimpangan sebesar 8.7%. Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, investasi asing terlihat secara signifikan memberikan pengaruh negatif, yaitu setiap kenaikan 1% pada investasi asing mampu menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 93%. Hal ini sekaligus membuktikan peran penting investasi asing dalam pembangunan.

Tabel 5 Pengaruh sektor keuangan dan indikator makro terhadap Gini index

Variable	Coeff	Std. Error	t-Stat	Sig	VIF
C	0.123431	0.263725	0.46803	0.645	
DEBT	-0.26838	0.220967	-1.21458	0.239	3.946
GRANTS	-0.08753	0.170595	-0.51311	0.613	1.569
FOREIGNDIRECTINVESTMENT	-0.936406	0.210273	-4.45328	0.0002**	3.072
NETEXPORT	0.110599	0.236013	0.468612	0.644	1.310
INFLASI	0.23387	0.195247	1.19783	0.245	2.033
R-squared					0.685602
Durbin-Watson stat					1.178974
Prob(F-statistic)					0.000162

* : $\alpha=0.05$, ** : $\alpha=0.01$

Sebaliknya, sektor keuangan menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Setiap peningkatan 1% pada ekspor neto mampu meningkatkan ketimpangan sebesar 11.5%, terutama jika ekspor neto tersebut bernilai negatif. Pada akhirnya, kenaikan 1% pada inflasi mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 23.3%.

SIMPULAN

Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa sektor keuangan yang terdiri dari utang, hibah, dan investasi asing dalam jangka pendek dan menengah mampu meningkatkan GDP dan GDP per capita Indonesia. Pada saat yang sama, ketiganya juga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Tetapi hal ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah, yaitu dalam jangka panjang, utang dan cicilannya akan menjadi beban sehingga mampu menurunkan PDB dan PDB per kapita. Hal ini terbukti pada tahun 1998, ketika utang dan cicilan jatuh tempo pada saat bersamaan sehingga menimbulkan krisis ekonomi dan menjalar ke krisis politik. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa mengandalkan utang sebagai pembiayaan utama dalam pembangunan, tetapi jika harus melakukan utang, maka penggunaan utang harus bertanggung jawab dan ditujukan pada pembiayaan produktif. Untuk kasus Indonesia selama periode 2000 – 2026, terlihat bahwa hibah lebih menguntungkan dalam pembiayaan pembangunan karena tidak ada kewajiban mengembalikan. Pada saat yang sama, hibah yang tepat sasaran juga mampu memberikan dampak multiplier effect yang besar bagi masyarakat sekaligus mampu meringankan beban anggaran. Investasi asing juga terbukti mampu meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia selama rentang waktu tersebut melalui pajak dan membuka lapangan kerja yang luas. Secara langsung ataupun tidak, investasi asing telah membuka peluang bagi produk dalam negeri ke pasar global hingga meningkatkan volume ekspor, sehingga menambah devisa bagi negara. Walaupun terdapat beberapa risiko terkait investasi asing, di antaranya profit repatriation dan kalah bersaingnya industri lokal, pemerintah tetap memberikan stimulus ekonomi dan kemudahan berinvestasi bagi investor asing.

Sedangkan untuk indikator ekonomi makro, secara khusus, terhadap ekspor neto dan inflasi, penelitian ini menjelaskan pengaruh negatif terhadap PDB dan PDB per capita. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan net ekspor dan inflasi, ternyata mampu menurunkan GDP dan GDP per capita. Kebalikannya, net ekspor dan inflasi memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Artinya, kenaikan pada net ekspor, terutama net ekspor negatif, begitu juga inflasi di Indonesia, terbukti mampu menambah kemiskinan dan ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. (2009). The Impact of Government Debt Issuance on Short-Term interest rates in Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 11(3 SE-Articles). <https://journal.ugm.ac.id/v3/gamaijb/article/view/15041>
- Akalpler, E., & Shamadeen, B. (2017). The role of net export on economic growth in United States of America. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12, 772–781.
- Akbas, Y. E., & Sancar, C. (2021). The impact of export dynamics on trade balance in emerging and developed countries: An evaluation with middle income trap perspective. *International Review of Economics & Finance*, 76, 357–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.06.014>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight. *Discover Global Society*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arham, M., & Payu, B. (2020). Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 8, 324–334. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.31698>
- Azzahra, R. N., Larasati, P., Rizki, M., & Priyono, B. (2025). The Role of MSMEs in

- Driving Sustainable Development in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 10(15 SE-Articles), 643–657. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19218>
- Batsuuri, T., Huidrom, R., & Wingender, P. (2026). *Golden Vision 2045 : Making The Most Out of Public Investment*. 26.
- Binetti, A., Nuzzi, F., & Stantcheva, S. (2024). People's understanding of inflation. *Journal of Monetary Economics*, 148, 103652. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.103652>
- Cartone, A., Panzera, D., & Postiglione, P. (2022). Regional economic disparities, spatial dependence and proximity structures. *Regional Science Policy & Practice*, 14(5), 1034–1051. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rsp3.12482>
- Coscieme, L., Mortensen, L. F., Anderson, S., Ward, J., Donohue, I., & Sutton, P. C. (2020). Going beyond Gross Domestic Product as an indicator to bring coherence to the Sustainable Development Goals. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119232. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119232>
- Dasgupta, D., & Mookherjee, D. (2023). A theory of progressive lending. *Games and Economic Behavior*, 137, 211–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geb.2022.11.005>
- Fadhilah, D. Z., Syahuri, T., & Hadi, S. (2025). *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara*. 8(193), 59–77. <https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.22416>
- Fernandez, M., Almaazmi, M., & Joseph, R. (2020). FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA: AN ANALYSIS FROM INVESTORS PERSPECTIVE. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10, 102–112. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10330>
- Gavilan-Ruiz, J. M., Ruiz-Gándara, Á., Ortega-Irizaro, F. J., & Gonzalez-Abril, L. (2024). Some Notes on the Gini Index and New Inequality Measures: The nth Gini Index. In *Stats* (Vol. 7, Issue 4, pp. 1354–1365). <https://doi.org/10.3390/stats7040078>
- Guandalini, A. (2022). *Things you should know about the gini index*. LXXVI.
- Hill, E. (Ned). (2023). What Is Economic Development? And What Is the Job of an Economic Development Professional? *Economic Development Quarterly*, 37(1), 34–48. <https://doi.org/10.1177/08912424221147013>
- Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in indonesia over half a century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
- Hulisnaini, H. (2022). *Analisis Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam (Synchronization Analysis of The National Medium-Term Development Plan For 2020-2024 With Batam Health Services Strategic Plan)*. 10.
- Judijanto, L., Ekasari, S., & Elida, S. (2024). Local Economic Development Based on Village Potential: a Literature Review. *Journal of Community Dedication*, 4(2), 414–426.
- Kamaludin, A. S. (2023). Rural Transformation and Poverty Reduction in Rural Area. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 7(1 SE-Articles), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.1.1-14>
- Kumari, K., & Yadav, S. (2018). Linear regression analysis study. *Journal of the Practice*

- of Cardiovascular Sciences*, 4, 33. https://doi.org/10.4103/jpcs.jpcs_8_18
- Kurnia, H., Masbar, R., Sirojuzilam, & Zulham. (2022). Effect of regional planning on social welfare in the Islands and mainland of Aceh Province. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 32(3), 356–374. <https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1900013>
- Lindblad, J. T. (2015). FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA: FIFTY YEARS OF DISCOURSE. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217–237. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061913>
- Muhyiddin, M. (2019). Future Challenges on Indonesia's Vision 2045. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i1.63>
- Nabillah, I., & Ranggadara, I. (2020). Mean Absolute Percentage Error untuk Evaluasi Hasil Prediksi Komoditas Laut. *JOINS (Journal of Information System)*, 5, 250–255. <https://doi.org/10.33633/joins.v5i2.3900>
- Ningrum, L., Nooraeni, R., Berliana, S. M., & Sari, L. K. (2024). Association of SDG Indicators of the Social Development Pillar in Indonesia using the Apriori Algorithm. *Procedia Computer Science*, 245, 450–459. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.271>
- Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2024). Government Intervention Strategy in Poverty Reduction: Study on the District and City in Indonesia Across 2016-2023. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 489–508. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.489-508>
- Rachmawati, Alya May, Wulandari, Dwi, & Narmaditya, Bagus Shandy. (2018). Financial Deepening and Income Inequality in Indonesia. *Global Business Review*, 22(1), 57–68. <https://doi.org/10.1177/0972150918811246>
- Rahim, D. A. (2023). Reviewing the Role of Investment in the West Kalimantan Border. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 83–93. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v18i1.2023.pp83-93>
- Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaukat, Y. (2022). Have the Government's Efforts to Build Border Areas Succeeded? Case Studies in Kalimantan Corridor - Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247377798>
- Resosudarmo, B. P., Anglingkusumo, R., & Aji, P. (2026). *ACHIEVING THE GOLDEN INDONESIA VISION 2045* (Issue January).
- Riyanti, I., & Press, B. (2025). *Diaspora Indonesia dan Visi Indonesia Emas 2045: Kontribusi Global untuk Kebangkitan Nasional*.
- Sari, V. K. (2022). *DEBT AND ECONOMIC GROWTH : THE CASE OF INDONESIA*. 7(2), 198–207. <https://doi.org/10.20473/jde.v7i2.25722>
- Sasrawan, I. P. H. (2025). Toward Golden Indonesia 2045: Policy Shifts, Governance Challenges, and Future Directions. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(8 SE-Review Article), 412–420. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i81943>
- Sibuea, M. Z., Aldy, F., Sembiring, I., Hanafiah, M., Fadhila, R., Manda, A., Putri, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Visi Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Sudut Pandang Agama , Negara , dan Warga Negara (Studi Kasus di Desa Kutalimbaru , Dusun 1 Kutalimbaru)*. 9, 21687–21693.
- Simanaviciene, Z., Giziene, V., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2015). Assessment of Investment in Higher Education: State Approach. *Procedia - Social and*

- Behavioral Sciences*, 191, 336–341.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.430>
- Simangunsong, B. Y. P. (2022). Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review. *JUREKA (Jurnal Ekonomi Pembangunan)*, 25–39.
<https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka/article/view/21>
- Sinaga, A. (2022). POVERTY PERSPECTIVES AND REDUCTION STRATEGIES IN INDONESIA. *Three Seas Economic Journal*, 3, 1–9.
<https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-3-1>
- Smith, B. C., & Yezer, A. M. (2025). A Lucas Critique of Mortgage Lending: Theory, Evidence, and Implications. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 70(4), 637–676. <https://doi.org/10.1007/s11146-023-09951-2>
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Sriyana, J. (2022). Fiscal and monetary policies to reduce inflation rate in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 82–91.
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art8>
- Su, S., & Soon, S. (2024). The impact of inflation on economic growth. *Issues and Perspectives in Business and Social Sciences*, 4, 187–201.
<https://doi.org/10.33093/ipbss.2024.4.2.6>
- Suyasa, I. M. G., Retnosari, L., & Taufiq, N. (2022). Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4.
<https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.156>
- Syahza, A., & Suarman, S. (2018). MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18, 365–386. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>
- Thawley, C., Crystallin, M., & Verico, K. (2024). Towards a Higher Growth Path for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(3), 247–282.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2432035>